



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KUWAT TRIYANA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **814568**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.125.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/163 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
2. Tanah Seluas 1.668 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
3. Tanah Seluas 1.385 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 165.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 407.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



4. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

5. MOBIL, HONDA HRV SE 1.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 10.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.074.575.831

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000

Sub Total Rp. 10.107.095.831

III. HUTANG Rp. 690.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.417.095.831

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.